



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025



**BUMI
MERAH
PUTIH**



H. Helmi Hasan, S.E. Ir. H. Mian
Gubernur Bengkulu Wakil Gubernur

**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2026**

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Makro	CAPAIAN KINERJA 2024	CAPAIAN KINERJA 2025	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,91	75,68	1,03
2	Angka Kemiskinan (Persen)	13,56	12,08	-10,91
3	Angka Pengangguran (Persen)	3,11	3,41	9,65
4	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,62	4,80	3,90
5	Pendapatan Per-Kapita (Rupiah)	49.233.124	52.304.544	6,24
6	Ketimpangan Pendapatan (Persen)	0,342	0,349	2,05

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2026

2. Ringkasan Capaian Kinerja urusan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja urusan Pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengukur dan mengurus urusan Pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No IKK	Urusan	IKK	Capaian	Satuan	Keterangan
1.a.1	Pendidikan	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	71,1256785	%	-
1.a.2	Pendidikan	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	96,0335622	%	-
1.a.3	Pendidikan	Persentase toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	45,6286428	%	-

1.a.4	Pendidikan	</p>Persentase ruang kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik</p>	43,1309904	%	-
2.p	Kebudayaan	<p>Persentase warisan budaya yang dilestarikan </p>	100	%	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2025.

B. Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lain yang sah sebesar Rp 198.960.577.890,-

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No IKK	Urusan	IKK	Capaian	Satuan	Keterangan
1.b.1	Kesehatan	<p>Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan</p>	1,3251537	Per 1000 Penduduk	-
1.b.2	Kesehatan	<p>Persentase Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi Paripurna</p>	100	%	-
1.b.3	Kesehatan	<p>Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana</p>	100	%	-
1.b.4	Kesehatan	<p>Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa provinsi</p>	100	%	-

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2025.

B. Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2025 sebesar Rp. 835.471.000 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

No	SPM	Anggaran (Rp.)
1.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi	816.268.000
2.	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	19.203.000

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2025.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja

No IKK	Urusan	IKK	Capaian	Satuan	Keterangan
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Persentase kondisi irigasi kewenangan provinsi</p>	-	%	-
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Tingkat kemantapan jalan</p>	75,5073242	%	-
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir</p>	13,4071402	%	-
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota</p>	25,65	%	-
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional</p>	-	%	-
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli</p>	63,9344262	%	-
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di provinsi</p>	-	%	-

B. Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Untuk alokasi anggaran jenis pelayanan Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota sebesar Rp. 74.911.272.740.
- b. Untuk alokasi anggaran jenis Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota sebesar Rp. 1.000.000.000.

4. Urusan Perumahan Rakyat

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No IKK	Urusan	IKK	Capaian	Satuan	Keterangan
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni	100	%	-
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	%	-
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	53,2461467	%	-
2.d.1	Pertanahan	Persentase ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah	-	%	-
2.d.2	Pertanahan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	-	%	-

B. Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat

Alokasi anggaran yang mendukung penyelenggaraan 2 (Dua) jenis SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2025 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan provinsi Bengkulu yang bersumber dari APBD dengan total pagu OPD sebesar Rp 9.924.098.098,0 sedangkan anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp 70.000.000,- dengan realisasi Rp 8.810.000,- karena tidak terjadi bencana alam skala provinsi.

5. Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No IKK	Urusan	IKK	Capaian	Satuan	Keterangan
1.e.1	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100	%	-
1.e.2	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	%	-

1.e.3	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	<p>Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan </p>	100	%	-
1.e.4	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	<p>Persentase penanganan pra bencana</p>	-	%	-
1.e.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	<p>Persentase penanganan tanggap darurat bencana</p>	100	%	-
1.e.6	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pasca bencana	30	%	-

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2025.

B. Alokasi Anggaran Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD.

Alokasi Anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi cakupan pemenuhan indikator SPM merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah sedangkan kontribusi positif dari peran serta masyarakat terhadap upaya pemenuhan indikator SPM bidang tugas Satpol PP Provinsi Bengkulu tahun 2025 ini untuk terinventarisirnya pemutahiran data petugas/ aparaturnya dan tersedianya personil /Petugas perlindungan masyarakat mekipun ketersediaan SDM masih belum memadai untuk menunjang keberhasilan optimal SPM yang harus dipenuhi.

Alokasi anggaran lingkup Satpol PP Provinsi Bengkulu untuk mendukung penerapan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar. Rp1.961.000.000,00 ,-

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No IKK	Urusan	IKK	Capaian	Satuan	Keterangan
1.f.1	Sosial	<p>Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti </p>	100	%	

1.f.2	Sosial	<p>Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti</p>	100	%	
1.f.3	Sosial	<p>Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti</p>	100	%	
1.f.4	Sosial	<p>Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti</p>	100	%	
1.f.5	Sosial	<p>Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi</p>	100	%	
1.f.6	Sosial	<p>Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar</p>	100	%	

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2025.

B. Alokasi Anggaran Urusan Sosial

Alokasi anggaran yang mendukung penyelenggaraan 5 (lima) jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial tahun 2025 pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yang bersumber dari APBD dengan total pagu OPD sebesar Rp. 17.971.776.394,- sedangkan anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan SPM bidang sosial sebesar Rp.2.343.078,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.817.382.700,- atau 77,56 %.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 dinyatakan bahwa pada tahun di maksud untuk LPPD Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak dilakukan Penilaian.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Nomor 298/S/XVIII.BKL/05/2025 Provinsi Bengkulu berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024, yang berarti Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu selama 10 (sepuluh) tahun terakhir mendapatkan 8 (delapan) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 2 (dua) opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (T.A) 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu T.A 2025. Realisasi pencapaian target kinerja APBD T.A 2025 dan 2024, diikhtisarkan sebagai berikut :

Laporan Realisasi Anggaran T.A 2025 dan 2024 *(dalam Rupiah)*

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran				% Naik/ (turun) 2025 dan 2024
	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	
1	2	3	4	5	6
Pendapatan	3,021,808,737,612.00	2,792,061,068,937.72	92,39	3,191,854,148,850.29	(12,52)
Belanja Daerah	3,142,101,458,327.00	2,878,646,587,197.29	91,61	3,140,472,406,450.41	(8,33)
Surplus/ (Defisit)	(120,292,720,715.00)	(86,585,518,259.57)	71,97	51,381,742,399.88	(268,51)
Pembiayaan	120,292,720,715.00	120,292,720,715.09	100	68,947,757,064.21	74,46
SiLPA	0	33,707,202,455.52	0	120,329,499,464.09	(71,98)

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2025, 2026.

Tabel di atas menunjukkan pencapaian target APBD T.A 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan T.A 2025 terealisasi belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp 3,021,808,737,612.00 dengan realisasi sebesar Rp 2,792,061,068,937.72 atau 92,39% dari anggaran.
2. Realisasi belanja T.A 2025 dibawah pagu anggaran belanja. Pagu belanja T.A 2025 ditetapkan sebesar Rp 3,142,101,458,327.00 dengan realisasi belanja sebesar Rp 2,878,646,587,197.29 atau 91,61% dari anggaran.
3. Penerimaan Pembiayaan T.A 2025 dianggarkan sebesar Rp 120,292,720,715.00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 120,292,720,715.09 atau 100 % dari anggaran.
4. SiLPA T.A 2025 sebesar Rp 33,707,202,455.52.

Realisasi Pendapatan dan Belanja T.A 2025, 2024 dan 2023 *(dalam Rupiah)*

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Pendapatan	2,792,061,068,937.72	3,191,854,148,850.29	2,991,013,990,544.34
Belanja Daerah	2,878,646,587,197.29	3,140,472,406,450.41	3,123,418,880,970.81

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu T.A 2025, 2026.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terjadi fluktuasi pendapatan dan belanja pada APBD Pemerintah Provinsi Bengkulu.

- Ikhtisar Perkembangan Realisasi dan Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Perkembangan realisasi dan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu T.A 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

**Rincian Laporan Realisasi Anggaran T.A 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)**

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran		Kenaikan/(Penurunan) antara Realisasi 2025 dan 2024	% Capaian Realisasi 2025 dibandingkan dengan 2024
	Realisasi 2025	Realisasi 2024		
Pendapatan Asli Daerah	1,008,772,425,252.72	1,085,297,962,753.29	(76,525,537,500.57)	(7,05)
Pendapatan Transfer	1,782,012,923,685.00	2,070,332,029,097.00	(288,319,105,412.00)	(13,92)
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	1,275,720,000.00	36,224,157,000.00	(34,948,437,000.00)	(96,47)
Jumlah	2,792,061,068,937.72	3,191,854,148,850.29	(399,793,079,912.57)	(12,52)
Belanja Operasi	2,093,432,025,526.34	2,401,947,454,836.41	(308,515,429,310.07)	(12,84)
Belanja Modal	604,685,407,647.95	427,113,855,904.00	177,571,551,743.95	41,57
Belanja Tak Terduga	0	0	0	0
Transfer	180,529,154,023.00	311,411,095,710.00	(130,881,941,687.00)	(42,02)
Jumlah	2,878,646,587,197.29	3,140,472,406,450.41	(261,825,819,253.12)	(8,33)
Surplus / (Defisit)	(86,585,518,259.57)	51,381,742,399.88	(137,967,260,659.45)	-268,51

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu T.A 2025, 2026.

5. RELISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN DAN REALISASI PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN, DAN REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Unaudited Tahun 2025 Realisasi Pendapatan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 mencapai sebesar Rp. 2.792.092.993.401 dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 mencapai Rp. 2.879.471.699.905 Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%) 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	3.021.808.737.612,0	2.792.029.993.401,72	92,39
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.241.301.332.918,00	1.008.848.861.476,72	81,72
4.1.01	Pajak Daerah	983.381.540.059,00	731.897.438.353,43	74.42
4.1.02	Retribusi Daerah	197.616.166.935,00	204.703.467.056,00	102.34
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.356.026.932,00	15.077.712.619,95	92,18
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	43.947.598.992,00	57.170.243.447,34	130,08
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.779.391.404.694,00	1.782.011.721.925,00	100,14
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.779.391.404.694,00	1.782.011.721.925,00	100,14

4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.116.000.000,00	1.169.410.000,00	104,78
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.116.000.000,00	1.169.410.000,00	104,78

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2025, 2026

Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%) 2025
5	BELANJA DAERAH	3.142.101.458.327,00	2.879.471.699.905,29	91,64
5.1	BELANJA OPERASI	2.178.676.621.555,00	2.094.257.138.234,34	96,12
5.1.01	Belanja Pegawai	1.311.525.726.872,00	1.306.586.178.952,00	99,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	848.302.074.693,00	765.451.581.577,34	90,23
5.1.05	Belanja Hibah	18.248.819.900,00	22.219.377.705,00	97,03
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	0	0,00
5.2	BELANJA MODAL	773.201.461.143,00	604.685.407.647,95	78,20
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.210.000.000,00	9.207.955.000,00	99,97
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.609.665.192,00	80.981.569.561,89	91,39
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.761.251.300,00	75.143.264.082,06	73,84
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	550.318.399.176,00	415.135.677.654,00	81,40
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.102.145.475,00	24.017.418.850,00	73,43
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	199.522.500,00	99,76
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	100.000.000,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	100.000.000,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	180.529.154.023,00	190.123.375.629,00	94,95
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	189.223.375.629,00	179.629.154.023,00	94,92
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2025, 2026

Kode Rekening	Jenis Pembiayaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%) 2025
6	PEMBIAYAAN DAERAH	120.292.720.715,00	120.292.720.715,09	100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	120.292.720.715,00	120.292.720.715,09	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	120.292.720.715,00	120.292.720.715,09	100,00
5.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	120.292.720.715,00	120.292.720.715,09	100,00
5.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0	0	00,00

Sumber : LKPD Provinsi Bengkulu TA 2025, 2026

6. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Tahun 2025 Provinsi Bengkulu memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi	Program dan Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tata Kelola Pemerintahan	Digital	Si PEDe PPD (SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN, EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH)	Implementasi	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

		Tata Kelola Pemerintahan	Digital	E-SAKIP	Implementasi	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	KETUPEK (KREATIVITAS TOBO KITO MELALUI PRODUK DAN TEKNOLOGI)	Implementasi	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pelayanan Publik	Digital	SIMAS TUBEL (SISTEM ADMINISTRASI TUGAS BELAJAR)	Implementasi	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
		Pelayanan Publik	Digital	SIKRESNA BERAKHLAK (SISTEM INFORMASI PROFESIONAL APARATUR BERAKHLAK)	Implementasi	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
3	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tata Kelola Pemerintahan	Digital	SI BULAT (SISTEM BANTU LACAK SURAT)	Implementasi	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Pelayanan Publik	Digital	SILAT (SISTEM INFORMASI PELATIHAN)	Implementasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pelayanan Publik/ Tata Kelola Pemerintahan	Digital	SIPANGGAR BAJA (SISTEM PERENCANAAN ANGGARAN HIBAH BERBASIS KINERJA)	Implementasi	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pelayanan Publik	Digital	SIDEBAR (SISTEM PENDATAAN ALAT BERAT)	Implementasi	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Pelayanan Publik	Digital	PUSAKO (PUSAT INFORMASI PAJAK KITO)	Implementasi	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pelayanan Publik	Non Digital	SIAP UNTUK SELAMAT	Implementasi	SubKegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
		Pelayanan Publik	Non Digital	RANCAK BANA (RESPON CEPAT BENCANA)	Implementasi	SubKegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	BELAJAR	Implementasi	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan	

						an Pengawasan Organisasi Masyarakat an	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	AGEN WASDIN (AGEN KEWASPADAAN DINI)	Implementasi	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
8	BADAN PENGHUBUNG	Pelayanan Publik	Non Digital	BASO MAS BEDJA (BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT BENGKULU DI JAKARTA DAN SEKITARNYA)	Implementasi	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Digital	e-ID PHB (KARTU IDENTITAS PEGAWAI BADAN PENGHUBUNG)	Implementasi	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	ANJELITA (LAYANAN ANTAR JEMPUT PERIZINAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI)	Implementasi	Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kab/ Kota	
		Pelayanan Publik	Non Digital	IBEK NASI (PELAYANAN PERIZINAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA DI PROVINSI BENGKULU)	Implementasi	Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Pelayanan Publik	Non Digital	KELOLA SAMPAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Implementasi	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	LABLING (PENGUNAAN SPEKTROFOME TERPORTABEL PENGUJIAN KUALITAS UDARA)	Implementasi	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	
11	DINAS KOPERASI DAN UKM	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	BANG USRO GEROT (PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH)	Implementasi	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	BANG WIRA CAKIL (PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN, KECAKAPAN DAN SKILL)	Implementasi	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	

12	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	GERTAK BUSER MATRA (GERAKAN TANAM BUAH UNGGUL BERSERTIFIKAT UNTUK MASYARAKAT SEJAHTERA)	Implementasi	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
		Pelayanan Publik	Non Digital	STAR SAWIT (STABILITAS HARGA KELAPA SAWIT DI PROVINSI BENGKULU)	Implementasi	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
13	DINAS PERHUBUNGAN	Pelayanan Publik	Non Digital	SICERDAS (SIGAP, CEPAT, RESPON, PENGENDALIAN LALU LINTAS)	Implementasi	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	METE ALIBABA (MANAJEMEN RUTE PENGALIHAN ANGKUTAN BATUBARA MELALUI TERMINAL KHUSUS BATUBARA)	Implementasi	Kegiatan Pembangunan , Penertiban Izin Pembangunan , dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	
14	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Publik	Non Digital	SIBUJANK (SIAP BANTU JAMINAN KESEHATAN)	Implementasi	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Daerah Provinsi	
		Tata Kelola Pemerintahan	Digital	SPOT (SISTEM PERENCANAAN OBAT TEPAT DAN AKURAT)	Implementasi	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
15	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	Pelayanan Publik	Digital	APO BUEK (APLIKASI ORANG BENGKULU E-PERPUS PROVINSI BENGKULU)	Implementasi	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	PAMER ARSIP (PAMERAN VIRTUAL ARSIP)	Implementasi	Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun	

		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	BIPENAKS (BIMBINGAN PENDAMPINGAN AKREDITASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH)	Implementasi	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	
16	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Pelayanan Publik	Non Digital	SANG MELI GRATIS (PEMASANGAN METERAN LISTRIK GRATIS)	Implementasi	Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
17	DINAS PARIWISATA	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	SIKOLA KE PANTAI (SINERGI KOLABORASI KERJASAMA PENGELOLAAN WISATA TERTIB AMAN & INDAH)	Implementasi	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
		Pelayanan Publik	Non Digital	SI-HAKI MEMBARA (FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEMBANTU RAKYAT)	Implementasi	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	INOTEK DESA (INOVASI DAN TEKNOLOGI DESA)	Implementasi	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	PAKDE SAJA (PERANGKAT DESA JADI SARJANA)	Implementasi	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Inovasi Bentuk Lainnya	Digital	LAPOR RUSAK PAK (APLIKASI PENGADUAN JALAN RUSAK)	Implementasi	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	SI PALPROT (MODIFIKASI ASPAL SEMPROT)	Implementasi	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	SILAT BANG KOSI (OPTIMALISASI FASILITASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETERNAKAN BERBASIS KORPORASI)	Implementasi	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	

		Inovasi Bentuk Lainnya	Digital	SIDIDARA (DISEMINASI DIGITAL UNTUK PENGENDALIAN RABIES)	Implementasi	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi	
21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Inovasi Bentuk Lainnya	Digital	SILANDO (SISTEM LAYANAN DUPAK ONLINE)	Implementasi	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Digital	SIKEJAR (SISTEM INFORMASI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR)	Implementasi	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	SARAH-SI (PASAR MURAH TERINTEGRASI)	Implementasi	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Digital	INFOREX (INFORMASI DATA EKSPOR)	Implementasi	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	
23	DINAS KETAHANAN PANGAN	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	GAPURA (GELAR PANGAN MURAH)	Implementasi	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Daerah Provinsi	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	SAPA B2SA (SADAR PANGAN BERAGAM BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN)	Implementasi	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita	
24	DINAS SOSIAL	Pelayanan Publik	Non Digital	KBS (KARTU BENGKULU SEJAHTERA)	Implementasi	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	LANSIA PERJAKA (PERKEBUNAN, ROHANI, JANGKRİK, KAMBING DAN AYAM)	Implementasi	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	

25	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	SELPEPELDA (SELEKSI PEMUDA PELOPOR DAERAH)	Implementasi	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Digital	SIWAPRES (SISTEM INFORMASI WADAH PRESTASI)	Implementasi	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
26	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pelayanan Publik	Non Digital	GTRA (GUGUS TUGAS REFORMASI AGRARIA)	Implementasi	Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	RTLH (PENINGKATAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI)	Implementasi	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	
27	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	Inovasi Bentuk Lainnya	Digital	APO LOKAK (LOKER MERAH PUTIH)	Implementasi	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
		Pelayanan Publik	Digital	SIPKA (SISTEM INFORMASI PASAR KERJA)	Implementasi	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
28	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	GAHWIN MELINDA (PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK MELALUI MOBIL PERLINDUNGAN)	Implementasi	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	SANTAPAN RASA (STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUMAH AMANAH RAFFLESIA)	Implementasi	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

29	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Publik	Digital	GOL IKD (GERAKAN OPTIMALISASI LAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL)	Implementasi	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	SANAK DUKCAPIL (SOSIALISASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS DUKCAPIL)	Implementasi	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	
30	INSPEKTORAT	Pelayanan Publik	Digital dan Non Digital	TEMANDUMAS (SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT)	Implementasi	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
		Pelayanan Publik	Digital	SIMONTELA (SISTEM MONITORING INFORMASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP)	Implementasi	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
30	INSPEKTORAT	Pelayanan Publik	Digital dan Non Digital	TEMANDUMAS (SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT)	Implementasi	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
		Pelayanan Publik	Digital	SIMONTELA (SISTEM MONITORING INFORMASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP)	Implementasi	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
31	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	SADHAKO (SAFARI RAMADHAN KOLABORASI)	Implementasi	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Digital	E-MOSI CAPER (ELEKTRONIK-MONITORING EKSEKUSI PEMBIAYAAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN)	Implementasi	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
32	BIRO PEREKONOMIAN	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	OKE MENIR (OPTIMALISASI AKSES KEUANGAN DAERAH DALAM MEMFASILITASI PEMBIAYAAN MELAWAN RENTENIR)	Implementasi	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	
		Tata Kelola Pemerintahan	Non Digital	MONITORING DAN EVALUASI BUMD	Implementasi	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	

33	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Inovasi Bentuk Lainnya	Digital	CAKEPDAH (APLIKASI CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH)	Implementasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	TIPE LISA (TIM PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA)	Implementasi	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
34	BIRO ORGANISASI	Tata Kelola Pemerintahan	Non Digital	AJAK BESTIE (SISTEM ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, STANDAR KOMPETENSI DAN EVALUASI JABATAN)	Implementasi	SubKegiatan Penataan Analisis Jabatan	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	BUDE BAPER (BUDAYA KERJA BANGUN AGEN PERUBAHAN)	Implementasi	SubKegiatan Penataan Analisis Jabatan	
35	BIRO UMUM	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	OPPA (OPTIMALISASI PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN ASET)	Implementasi	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	BARASERUYAT (BALAI RAYA SEMARAK SEBAGAI RUMAH RAKYAT)	Implementasi	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolatan	
36	BIRO HUKUM	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	NGOTA KUDAI (NGOBROLIN PERATURAN YANG BISA DIBUKA DENGAN AI)	Implementasi	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Digital	TAPAI SUSAN (TAHAPAN PENCARIAN ARSIP KEPUTUSAN)	Implementasi	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
37	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) M.YUNUS BENGKULU	Pelayanan Publik	Non Digital	BEKESAN (BINCANG EDUKASI KESEHATAN)	Implementasi	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	
		Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	DAMPING SEMANGAT KANKER	Implementasi	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	
38	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA (RSKJ) SOEPRAPTO BENGKULU	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	KELAS SAHABAT ANAK	Implementasi	SubKegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
		Pelayanan Publik	Digital	E-RESERVASI	Implementasi	SubKegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	

39	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	SATU SISI SALAH (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MASUK SEKOLAH MENGATASI MASALAH)	Implementasi	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
40	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	Inovasi Bentuk Lainnya	Non Digital	KAWAN (PERPUSTAKAAN SETWAN)	Implementasi	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Pelayanan Publik	Non Digital	JARINGAN ASMARA DAN POKIRnb	Implementasi	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	

Semoga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintahan Provinsi Bengkulu dan Pemerintahan Pusat dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin

Gubernur Bengkulu,



H. Helmi Hasan